

**RENCANA KERJA SKPD  
KECAMATAN UMBULHARJO  
KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KECAMATAN UMBULHARJO  
JL. GLAGAH SARI 99 TELEPON 0274 375782  
YOGYAKARTA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan – pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan menyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.

Rencana Kerja SKPD ini berfungsi untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja SKPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

### **1.2 LANDASAN HUKUM**

1. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. UU No. 17 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
4. UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.
5. UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah...
8. Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no. 8 Tentang tahapan tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan , Susunan Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta 2007-2026
12. Peraturan Daerah Nomor 07.Tahun 2012 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2012-2016.
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kota Yogyakarta.
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### 1. Maksud

Disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman penyusunan RKA dan DPA.

#### 2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya RENJA ini yaitu :

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima pada masyarakat.
- Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan semangat dan nilai-nilai Gerakan Segoro Amarto menuju Masyarakat Kecamatan Umbulharjo yang cerdas, sehat dan sejahtera.

### **1.4 SISTEMATIKA**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### 1.1 Latar Belakang

##### 1.2 Landasan Hukum

##### 1.3 Maksud dan Tujuan

##### 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III TUJUAN, SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

## **BAB IV PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSAAN RENJA TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan Renja Kecamatan Umbulharjo Tahun 2016, meliputi 6 (enam) Program yang terdiri :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (P A P) :

Program PAP Kecamatan Umbulharjo tahun 2016 memiliki input Anggaran sebesar Rp 1.628.294.567,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.461.298.143,92 atau 89,7 % Tahun 2017 target Anggaran sebesar Rp1.501.236.951,00 capaian realisasi diharapkan dapat mencapai 100 %. Capaian Program PAP tidak dapat mencapai 100 % dikarenakan Kecamatan Umbulharjo beserta Kelurahan dapat melakukan penghematan listrik, air, telepon dan belanja yang lainnya. Pencapaian target selama 5 tahun cenderung mengalami kenaikan, hal ini disebabkan adanya evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan yang ada, walaupun kenyataannya tidak dapat mencapai 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

Program ini pada Tahun Anggaran 2016 memiliki input Anggaran sebesar Rp 377.083.500,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp 269.686.550,00 atau 78,7% dan Tahun 2017 Target Anggaran sebesar Rp448.421.175,00 dengan target realisasi sebesar 100%.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program ini pada Tahun Anggaran 2016 memiliki anggaran sebesar Rp 46.510.000,00 dan terealisasi Rp. 46.450.000,00 atau 99,9% dan Tahun 2017 Kecamatan Umbulharjo tidak menganggarkan untuk program tersebut.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.

Program ini pada Tahun Anggaran 2016 memiliki anggaran sebesar Rp 29.030,250,00 dan terealisasi Rp. 12.920.00,00 atau 44,5% dan Tahun 2017 Target anggarannya sebesar Rp82.353.750,00 dengan realisasi 100%. Program ini bertujuan untuk peningkatan pengembangan pelaporan kinerja Keuangan dan kinerja OPD agar dalam pelaksanaan pelaporan tepat waktu sesuai dengan target.

5. Program Pelayanan Masyarakat berbasis Kewilayahan

Program ini pada Tahun 2016 memiliki input anggaran sebesar Rp 794.195.437,00 dan terealisasi sebesar Rp 636.487.003,70 atau 80,17% dan pada Tahun 2017 program ini sudah menjadi satu program menjadi Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayah Kecamatan Umbulharjo.

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

Program ini pada Tahun 2016 memiliki input anggaran Rp 4.020.835.550,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.699.997.000,00 atau 92,00% dan pada Tahun 2017 Program ini menjadi satu program yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo dengan anggaran sebesar Rp 4.602.554.448,00 dengan target realisasai 100%.

(untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 2.1)

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Kecamatan Umbulharjo untuk menguji kinerja pelayanan dengan menggunakan SKM yang dilakukan setiap 6 bulan sekali, sedangkan standar Pelayanan menggunakan peraturan – peraturan yang sudah ditetapkan baik secara teori maupun secara teknis , seperti kependudukan, perijinan, legalisasai dan lain-lain. ( untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 2.2)

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Kinerja Kecamatan Umbulharjo berdasarkan pada pelimpahan yang telah direkomendasikan oleh Walikota Yogyakarta. Pelimpahan kewenangan adalah sebagian besar masih berupa Koordinasi, rekomendasi dan Fasilitasi serta pemberian kajian sosial. Kewenangan pelayanan Kecamatan Umbulharjo adalah berupa pelayanan legalisasi surat-surat tertentu, pemberian gangguan dengan batas yang sudah ditentukan, pemberian ijin bangun-bangunan dengan standar yang sudah ditentukan, pemberian ijin Pedagang Kaki Lima, Pemberian ijin pondokan dengan batas tertentu. Pelayanan kependudukan masih bersifat pembantuan yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan pelayanan di Kecamatan Umbulharjo masih bersifat umum seperti, Kualitas SDM, kurang personil, dan minimnya fasilitas pelayanan yang sesuai standar. Disamping itu masih terdapatnya hambatan yang bersifat struktural misalnya masih adanya duplikasi kewenangan atau ketidakjelasan kewenangan, hal ini diakibatkan belum adanya standar operasional yang bersifat komprehensif. Pada jenis-jenis Pelayanan tertentu Kecamatan Umbulharjo diberikan kewenangan untuk mengkoordinasikan, merekomendasikan dan memberikan kajian, tapi belum ada standar baku yang menjadi petunjuk dalam pelaksanaannya.

Permasalahan tersebut akan berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat disebabkan adanya duplikasi atau bahkan kekosongan kewenangan, yang demikian ini dapat memberikan gambaran pada masyarakat tentang kurangnya koordinasi antar instansi dan dapat menyebabkan ketidak jelasan dalam mekanisme pelayanan. Dengan adanya persepsi tersebut berakibat pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang ada di tingkat Kecamatan.

Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat seiring dengan perkembangan yang bersifat regional, nasional bahkan internasional. Dengan adanya perkembangan tersebut pemerintah dan personilnya seharusnya lebih konsisten dan berusaha melaksanakan perubahan seiring dengan berkembang yang ada. Pelayanan terhadap masyarakat akan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan pemikiran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat maka sebuah OPD harus mempunyai



peluang dalam pelaksanaan pemecahan masalah pelayanan dalam masyarakat, sehingga apabila ada kesenjangan dan permasalahan dapat segera diatasi.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Proses ini dilaksanakan agar perencanaan kegiatan ini bersifat faktual dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan, disamping itu juga memperhatikan kemampuan APBD Kota Yogyakarta. Sehubungan rancangan awal ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi serta kemampuan APBD, maka rancangan awal ini bisa menjadi rancangan kerja SKPD. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat dilihat dalam tabel 2.3

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam rencana kerja, dapat melalui mekanisme Musrenbang, keluhan dan kebutuhan yang nyata. Sehubungan dengan keterbatasan dana dan personil Kecamatan Umbulharjo, usulan yang direalisasikan adalah usulan yang bersifat koordinatif, sosialisasi dan pemberian fasilitas yang akan ditampung dalam program pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan. Sedangkan usulan yang lainnya akan diteruskan kepada OPD yang membidangi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam tabel 2.4

## **B A B III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan Nasional dan Prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD di Kecamatan Umbulharjo adalah program nasional yang melekat dikementrian /LPND, dan jumlah program yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Umbulharjo ada 3 program yaitu :

1. Program Pengelolaan Desentralisasi dan otonomi Daerah
2. Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

##### **Tujuan**

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Memantapkan Pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi dan misi.

##### **Sasaran**

1. Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2. Terselenggaranya pengembangan penyebarluasan informasi, penyelenggaraan pemerintahan,, monitoring dan pengumpulan data/informasi berbasis kewilayahan serta pelayanan perijinan dan pemungutan.
3. Terselenggaranya pengembangan penyusunan dokumen perencanaan berbasis kewilayahan.

#### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang ada di OPD Kecamatan Umbulharjo mengacu pada program dan kegiatan yang ada di Tingkat Kota Yogyakarta untuk mencapai visi dan misi Kota Yogyakarta, serta untuk mensejahterakan masyarakat dan mengembangkan perekonomian warga.

Program yang ada di Kecamatan Umbulharjo ada 6 Program yang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
5. Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo

Program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Umbulharjo menyebar di 7 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Umbulharjo dan lebih banyak terfokus pada bidang kesehatan masyarakat dan peningkatan perekonomian masyarakat yang dalam hal ini dapat mensejahterakan masyarakat dengan nilai-nilai Gerakan Segoro Amarto menuju masyarakat Kecamatan Umbulharjo yang cerdas, sehat dan sejahtera.

Apabila rencana program dan kegiatan di Kecamatan Umbulharjo dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan rancangan awal maka hal demikian kemungkinan terjadi kesalahan pada sasaran atau kawasan yang salah dalam perencanaannya, untuk itu dalam perencanaan kali ini sudah dicoba untuk penataan dan perencanaan yang lebih teliti dan lebih detail, dan apabila terjadi ketidak sesuain maka akan menjadi sustu pelajaran dan koreksi pada kita semua bahwa suatu perencanaan harus dilakukan dengan teliti dan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan instansi yang terkait.

Rencana Program dan Kegiatan yang ada di Kecamatan Umbulharjo dapat dilihat pada Tabel 3.1

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 sebagai berikut :

1. Meskipun perencanaan anggaran telah dibuat sebaik dan sematang mungkin tetapi tetap masih ada kegiatan yang tidak dapat dicukupi dengan anggaran sesuai dengan perencanaan, terutama untuk kegiatan pemeliharaan baik komputer, kendaraan, sarana prasarana kantor maupun gedung, karena kerusakan tidak bisa diprediksi sehingga kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana sulit dianggarkan secara secara tepat.
2. Perencanaan Anggaran Kegiatan khususnya kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan harus melibatkan semua bidang dan seksi di Kecamatan Umbulharjo.
3. Penggunaan anggaran harus didasarkan pada DPA dan harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan tertib sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Umbulharjo Tahun 2018 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tahun 2018.

**CAMAT UMBULHARJO**

**Drs. H. MARDJUKI**  
**NIP. 19601212 198003 1 008**